

PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah)

Fajar Nugroho, Abdul Rohman¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The research aims to analyze the influence of Capital Expenditure for financial performance growth through revenue affluent as intervening variables. This research refers to a previous research's conducted by Asha Florida (2007). Objects of this research is the entire district and city in Central Java province.

The research was carried out by the method of documentation. The data used are secondary data, which comes from the realization of the Budget Report Revenue and Expenditure (Budget) of the city district in Central Java from 2008 until 2010.

The results of this study indicate that the Capital Expenditures negatively affect the growth of the region's financial performance directly, whereas indirect positive effect on Capital Spending Growth through Revenue Financial Performance as an intervening variable region.

Keywords: Capital Expenditure, revenue, Financial Performance, the realization of the Budget Report Revenue and Expenditure (Budget) Report.

PENDAHULUAN

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2008) analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan pertumbuhan (Sularso & Restianto, 2011).

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi

¹ Penulis penanggung jawab

lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Harianto dan Adi, 2007).

Sejak tahun 1997 telah terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia, dampak dari krisis tersebut terlihat pada sektor swasta seperti pasar modal dan pada sektor public (pemerintah). Berbagai dampak negatif seperti bertambahnya pengangguran dan peningkatan kemiskinan bermunculan. Pengaruh negatif krisis moneter juga terjadi pada APBN yang pada gilirannya berdampak pula pada APBD. Sektor pendapatan sangat labil atau faktor ketidakpastian akan penerimaan dari Pemerintah pusat menjadi lebih tinggi. Kondisi tersebut lebih memperhatikan pada daerah yang Pendapatan Asal Daerah (PAD) rendah. Dengan PAD yang rendah berarti ketergantungan kepada pemerintah pusat lebih tinggi.

Pajak dan retribusi daerah yang menjadi komponen utama dari PAD juga terpengaruh akibat terjadinya krisis ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat adanya krisis ekonomi menyebabkan terganggunya penerimaan masyarakat yang kemudian mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah yang mengakibatkan pendapatan daerah menjadi lebih rendah dan tidak menentu. Dengan keadaan pemerintah yang mengalami tekanan keuangan mengakibatkan penyusunan APBD menjadi tidak pasti sehingga menyebabkan kemungkinan adanya pergeseran pada komponen-komponen pendapatan dan belanja daerah. Tekanan keuangan (*fiscal stress*) berakibat pada tidak stabilnya kesiapan Pemerintah Kabupaten dan Kota terutama pada segi keuangannya, kinerja keuangan merupakan salah satu tolak ukur dan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah.

Jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah Pemerintah Daerah mampu untuk mengidentifikasi perkembangan kinerjanya dari tahun ke tahun. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2004: 148). Penggunaan analisis rasio keuangan secara luas telah digunakan oleh *private sector*, sedangkan pada lembaga publik penggunaannya masih terbatas. Padahal dari hasil analisis dapat diketahui tingkat kinerja Pemerintah Daerah dan diharapkan dapat dijadikan suatu acuan untuk meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asha Florida yang meneliti tentang analisa pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Sumatera Utara. Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini ditambahkan variabel Belanja Modal dan menjadikan variabel pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening untuk mengukur pertumbuhan Kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu juga sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening di Provinsi Jawa Tengah pada periode waktu dari tahun 2008 hingga 2010.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, untuk kepentingan jangka pendek, pungutan yang bersifat *retribusi* lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas layanan publik tidak mengalami peningkatan (Mardiasmo 2002). Belanja Modal tidak hanya ditujukan untuk pengembangan infrastruktur industry, tetapi juga ditujukan untuk berbagai infrastruktur jasa yang langsung terkait dengan pemberian layanan kepada publik. Upaya peningkatan PAD melalui retribusi ataupun pajak harus diimbangi dengan kesungguhan pemda untuk meningkatkan kualitas layanan publik (Adi, 2006).

Kinerja keuangan daerah adalah sebagaimana kemampuan pemerintah daerah untuk mengkasikan keuangan daerah melalui penggalan kekayaan asli daerah yang dikatakan sebagai pendapatan asli daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya oleh pemerintah daerah. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah (Florida, 2007).

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan

diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya karena PAD ini sendiri merupakan komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah (dalam penelitian ini terdiri dari kabupaten/kota provinsi jawa tengah) dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut.

Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan

Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak. Hal ini sesuai dengan definisi yang ada sebelumnya, dimana PKKD berarti adalah "peningkatan capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dan Belanja Modal dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dari satu periode anggaran ke periode anggaran berikutnya".

H₁ : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan

Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan melalui Pendapatan Asli daerah

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas (Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002). Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah (Adi & Harianto, 2007).

Perubahan alokasi belanja ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah (Wong, 2004 dalam Adi, 2006). Hipotesis yang dikembangkan dari pemaparan ini adalah sebagai berikut :

H₂ : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

1. Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2008) analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat

desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan pertumbuhan (Sularso & Restianto, 2011).

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas (Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002). Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah (Adi & Harianto, 2007).

Perubahan alokasi belanja ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah (Wong, 2004 dalam Adi, 2006)..

Selain menggunakan parameter rasio keuangan pemerintahan daerah dari hasil penelitian terdahulu, analisis Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini juga memakai analisa kinerja keuangan yang telah dikembangkan oleh Musgrave, Richard A dan B. Musgrave, Peggy dalam bukunya "*Public Finance in Theory and Practice*". (Hadiprojo, Ekonomi Publik hal. 155) Namun dalam penerapannya, parameter disesuaikan dengan komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu :

1. Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintahan pusat dan daerah yang diukur dengan rasio sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}}$$

Upaya fiskal antara lain adalah:

Total anggaran Pendapatan Asli Daerah merupakan Target besarnya pajak daerah yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan berdasarkan kemampuan rasional yang dapat dicapai.

2. Kemandirian/kemampuan pembiayaan antara lain adalah:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Jumlah Belanja Rutin Non Belanja Pegawai}} = \frac{\text{PAD}}{\text{BRNP}}$$

Belanja rutin non pegawai merupakan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok pelayanan masyarakat yang terdiri dari belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas, pengeluaran tidak termasuk bagian lain dan pengeluaran tidak tersangka serta belanja lain-lain.

$$\text{Kemampuan Mobilisasi Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$$

3. Efisiensi penggunaan anggaran (kinerja pengeluaran) adalah:

$$\frac{\text{Total Sisa Anggaran}}{\text{Total Belanja Daerah}} = \frac{\text{TSA}}{\text{TBD}}$$

Sisa anggaran (Sisa Perhitungan Anggaran) merupakan selisih lebih antara penerimaan daerah atas belanja yang dikeluarkan dalam satu tahun anggaran ditambah selisih lebih transaksi pembiayaan penerimaan dan pengeluaran, yaitu:

Total Pengeluaran Lainnya

Total Belanja Daerah

Pengeluaran lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pengeluaran tidak termasuk bagian lain ditambah dengan pengeluaran tidak terduga yang direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Sedangkan Total belanja daerah merupakan jumlah keseluruhan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran yang membebani anggaran daerah.

Karena dalam pelaksanaannya penelitian ini mengalami masalah dengan pengumpulan data dan keterbatasan waktu maka dengan keterbatasan tersebut peneliti tidak menggunakan semua rasio tersebut. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian/kemampuan pembiayaan dan rasio desentralisasi fiskal.

2. Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Indikator variabel belanja modal diukur dengan :

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \\ & \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan,} \\ & \text{Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya} \end{aligned}$$

3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Variabel Pendapatan Asli daerah diukur dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{PAD} = & \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan} \\ & \text{Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang} \\ & \text{Sah} \end{aligned}$$

Penentuan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota / kabupaten di Jawa Tengah. Teknik penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode sensus adalah metode dengan mengambil sampel seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Data sampel yang digunakan adalah kabupaten dan kota di Jawa Tengah yaitu 35 kabupaten / kota.

Penelitian ini difokuskan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sejak tahun 2001 otonomi daerah telah defenitif berlaku, dimana pembiayaan daerah lenih ditekankan pada sumber-sumber PAD, namun secara efektif hal ini belum terlaksana.
2. Kemampuan daerah untuk menghasilkan PAD adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang sangat dituntut di dalam otonomi daerah.
3. Data yang dibutuhkan untuk analisa penelitian dapat diperoleh dari data sekunder, yaitu Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Lokasi penelitian di lingkungan Pemerinta Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah dan kantor BPS propinsi Jawa Tengah.

Metode Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif, pengujian *outer model*, pengujian *inner model* dan uji hipotesis (*path coefficients*).

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan sebagainya (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal.

Metode analisis yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS). Alasan utama menggunakan metode analisis ini adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini semuanya adalah variabel laten dimana variabel-variabel tersebut tidak bisa diukur secara langsung dan harus melalui indikator untuk mengukurnya. PLS adalah metode alternatif dalam persamaan struktural. PLS merupakan salah satu metode untuk melaksanakan model *Structural Equation Modelling* (SEM). Model PLS digunakan pada saat dasar teori perancangan model lemah dan indikator pengukuran tidak memenuhi model pengukuran yang ideal. PLS dapat digunakan dengan jumlah sampel yang tidak besar dan dapat diterapkan pada semua skala data (Ghozali, 2011). Untuk tujuan penelitian ini metode ini dirasa lebih baik dibandingkan *software* SEM yang lain, misalnya AMOS dan LISREL.

$$Y1 = \alpha_1 + cX$$

$$Y2 = \alpha_2 + aX$$

$$Y3 = \alpha_3 + c'X + bM$$

Dimana :

Y1 = Pertumbuhan Kinerja Keuangan

Y2 = Pendapatan asli Daerah (PAD)

Y3 = Pertumbuhan Kinerja keuangan

α 1,2,3 = Konstanta 1,2,3

cX = Belanja Modal

aX = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

c'X = Belanja Modal (Hub. Tidak langsung)

bM = Pendapatan Asli Daerah (Hub. Tidak langsung)

Outer Model

Convergent validity dari model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk

yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading* 0,50 sampai 0,60 dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2006). *Discriminant validity* dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka akan menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik daripada ukuran blok lainnya.

Sedangkan untuk menilai reliabilitas model, dipergunakan *composite reliability* dari suatu konstruk. *Composite reliability* yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu *internal consistency* dan *cronbach alpha* (Ghozali, 2011). Dibandingkan dengan *cronbach alpha*, ukuran *composite reliability* tidak mengasumsikan *tau equivalence* antar pengukuran dengan asumsi semua indikator memiliki bobot sama. Sehingga *cronbach alpha* cenderung *lower bound estimate reliability*, sedangkan *composite reliability* merupakan *closer approximation* dengan asumsi estimasi parameter lebih akurat (Ghozali, 2011).

Inner Model

Inner model menggambarkan hubungan antara variabel laten yang ada pada model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif (Ghozali, 2011). Di samping melihat nilai *R-square*, model PLS juga dievaluasi dengan melihat *Q-square* prediktif relevansi untuk model konstruktif. *Q-square* mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik *resampling* dan *bootstrapping*. Pengaruh antar variabel dianggap signifikan pada tingkat 5% jika nilai *T-statistic* lebih besar dari T tabel 1,96 (Ghozali, 2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2008-2010. Pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *sensus*. Metode sensus adalah metode dengan mengambil sampel seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Data sampel yang digunakan adalah kabupaten dan kota di Jawa Tengah yaitu 35 kabupaten / kota.

Deskripsi Variabel

Analisis deskriptif dari data yang diambil untuk penelitian ini adalah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dari 35 kabupaten / kota di Jawa Tengah. Dengan menggunakan data gabungan (*pool*) selanjutnya diperoleh sebanyak $2 \times 35 = 70$ data pengamatan. Distribusi statistik deskriptif untuk masing-masing variabel terdapat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 1
Statistik Deskriptif
(Dalam Juta)

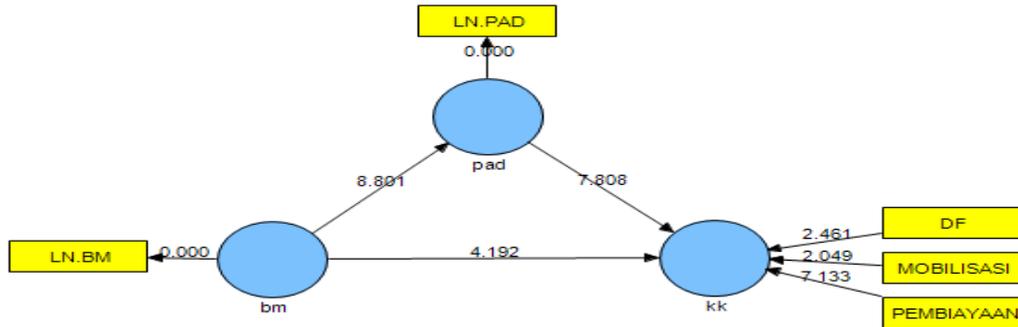
Keterangan		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	70	Rp 17.994,00	Rp 812.213,00	Rp 144.909,91	Rp 90.533,83
PAD	70	Rp 22.545,00	Rp 293.826,73	Rp 71.257,94	Rp 40.351,22
Pembiayaan	70	Rp 0,10	Rp 0,59	Rp 0,35	Rp 0,10

Mobilisasi	70	Rp	0,09	Rp	1,52	Rp	0,24	Rp	0,19
Desentralisasi Fiskal	70	Rp	0,31	Rp	6,41	Rp	1,33	Rp	1,12
Valid N (listwise)	70								

Sumber : Data yang diolah, 2012

Pembahasan Hasil Penelitian

Gambar 1
Hasil Olah PLS



Sumber : Data PLS yang Diolah, 2012

Outer Loadings

Penelitian ini menggunakan indikator formatif untuk masing-masing variable laten. Pengujian mengenai *outer loading* menunjukkan pengujian terhadap masing-masing indikator dalam menjelaskan konstruk variable letennya. Nilai t yang signifikan menunjukkan dimensionalitas variabel yang baik. Hasil pengujian outer loading diperoleh sebagai berikut :

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic	Keterangan
BM					
ln.bm	1.000	1.000	0.000		
PAD					
ln.pad	1.000	1.000	0.000		
KK					
DF	0.345	0.298	0.140	2.461	Baik
Mobilisasi	0.231	0.236	0.113	2.049	Baik
Pembiayaan	0.765	0.775	0.107	7.133	Baik

Sumber : Data yang diolah, 2012

Hasil pengolahan dengan menggunakan SmartPLS dapat dilihat pada Tabel diatas diperoleh nilai *outer model* atau korelasi antara konstruk dengan variabel yang secara umum sudah cukup mendukung konsep pengukuran masing-masing variable karena memiliki nilai loading faktor (sample estimate) di atas 0,50 dan memiliki nilai pengujian t di atas 1,96.

Inner Loadings

Inner loadings merupakan pengujian terhadap model struktural sebagaimana dihipotesiskan. Pengujian mengenai *inner loadings* menunjukkan pengujian terhadap hubungan masing-masing variable laten yang dihipotesiskan. Nilai t yang signifikan menunjukkan hasil pengujian inner model. Terdapat 3 pengujian inner model yang diuji dalam penelitian ini. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut :

Tabel 2
Inner Loadings

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic
BM -> KK	-0.607	-0.572	0.145	4.192
BM -> PAD	0.791	0.766	0.089	8.801
PAD -> KK	0.939	0.943	0.120	7.808

Sumber : Data PLS yang Diolah, 2012

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan menguji pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan 3 rasio keuangan. Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen, uji t, serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan adalah $\pm 1,96$, dimana apabila nilai t hitung $< t$ tabel (1,96) maka hipotesis alternatif (H_1) akan ditolak atau dengan kata lain menerima hipotesis nol (H_0).

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengaruh variabel Belanja modal terhadap kinerja keuangan menunjukkan arah koefisien negatif sebesar -0.607

. Nilai uji t diperoleh sebesar 4.192. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel (1,96). Hasil ini berarti bahwa Belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan namun dengan arah negatif. Hal ini berarti **Hipotesis 1 ditolak**.

Hasil diatas menunjukkan bahwa harapan pemerintah dengan meningkatkan alokasi belanja modal akan meningkatkan kinerja pemerintah ternyata tidak terjadi. Hal ini dikarenakan kinerja pegawai yang tidak maksimal dan lebih cenderung untuk melakukan tindakan korupsi dengan menyalah gunakan anggaran belanja modal tersebut untuk kepentingan pribadi. Seperti yang dilakukan oleh Istri Wali Kota Salatiga, Titik Kirnaningsih yang juga sebagai anggota DPRD kota Salatiga ini dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS).

Pengaruh Tidak Langsung Dari Belanja Modal (BM) Terhadap Kinerja Keuangan Melalui PAD

1. Pengaruh Belanja Modal (BM) Terhadap PAD

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh variabel Belanja modal terhadap PAD memiliki koefisien dengan arah positif dan nilai t diperoleh sebesar 8.801. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel (1,96). Hasil ini berarti bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya belanja modal maka akan

berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya karena PAD ini sendiri merupakan komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah (dalam penelitian ini terdiri dari kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah) dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut.

2. Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh variabel PAD terhadap Kinerja Keuangan memiliki koefisien dengan arah positif dan nilai t diperoleh sebesar 7.808. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel (1,96). Hasil ini berarti bahwa PAD memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa peningkatan PAD dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah karena dengan meningkatnya PAD pemerintah dapat memenuhi pembiayaan untuk belanja daerahnya sendiri. Dengan demikian kemandirian pemerintah daerah juga akan semakin meningkat karena tidak lagi perlu bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat.

Pengujian **hipotesis 2** dilakukan dengan menguji pengaruh tidak langsung dari Belanja Modal (BM) terhadap Kinerja Keuangan melalui PAD. Pengujian dilakukan dengan menggunakan rumus Sobel. Hasil pengujian dengan rumus Sobel diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Koefisien Jalur dan Standard Error

	P	SE
BM -> PAD	0.791	0.089
PAD -> KK	0.939	0.120

Sumber : Data PLS yang Diolah, 2012

Dari hasil tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Sobel sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Rumus Sobel

	P_1P_2	$P_1^2 \cdot SE_2^2$	$P_2^2 \cdot SE_1^2$	$SE_1^2 \cdot SE_2^2$	t	Keterangan
BM -> PAD ->KK	0.742749	0.00901	0.006984	0.000114	5.852232	Signifikan

Sumber : Data PLS yang Diolah, 2012

Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD dapat memediasi pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t dari hasil cross product yang lebih besar dari 1,96. Dengan demikian **Hipotesis 2 diterima**.

Hasil diatas menunjukkan bahwa dengan meningkatnya belanja modal berarti pemerintah telah meningkatkan infrastruktur yang ada sehingga masyarakat dapat lebih produktif dalam melakukan pekerjaannya dan dapat membayar segala macam bentuk pajak dan retribusi daerah yang nantinya akan meningkatkan PAD, peningkatan PAD ini juga yang kemudian akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi tuntutan masyarakat.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan bahwa variasi variable bebas dalam menjelaskan variable terikatnya. Nilai koefisien determinasi R^2 diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.6

Koefisien Determinasi

	<i>R-square</i>
PAD	0.626
KK	0.348

Sumber : Data PLS yang Diolah, 2012

Nilai koefisien determinasi R^2 variabel PAD menunjukkan nilai besar 0.626. Hasil ini mengindikasikan bahwa 62,6% variasi PAD dapat dijelaskan oleh Belanja modal dan selebihnya sebesar 37,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Nilai koefisien determinasi R^2 variabel Kinerja keuangan menunjukkan nilai besar 0.348. Hasil ini mengindikasikan bahwa 34,8% variasi tingkat kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh belanja modal dan PAD dan selebihnya sebesar 65,2% dipengaruhi oleh variabel lain.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Dari hasil analisa dan pembahasan mengenai pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan melalui PAD sebagai variabel intervening pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut : (1). Belanja modal secara signifikan berpengaruh negatif secara langsung terhadap kinerja keuangan. Artinya komponen Belanja Modal ternyata tidak mempengaruhi Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Harapan pemerintah terhadap para pegawai yang terlibat untuk dapat meningkatkan kinerjanya ternyata tidak berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah banyaknya korupsi yang dilakukan. Ternyata dengan bertambahnya dana untuk meningkatkan pembangunan daerah menjadi sebuah kesempatan bagi sejumlah oknum untuk melakukan tindakan korupsi. Hal tersebut yang dapat merugikan pemerintah dan menurunkan Kinerja pemerintah dimata masyarakat. (2). Belanja modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah. Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas (Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002). Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Perubahan alokasi belanja ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: (1). Dari 29 Kabupaten dan 6 kota yang diteliti ada potensi yang tidak sama sehingga menjadi kendala dalam laporan/informasi. (2). Penelitian ini baru menguji 2 indikator kinerja keuangan yakni: rasio pembiayaan dan rasio desentralisasi fiskal, sedangkan rasio lain seperti rasio ketergantungan, efektifitas, efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio belum diteliti. (3). Riset dilakukan hanya menggunakan data sekunder laporan

keuangan pemerintah daerah tahun 2008-2010, tanpa dilakukan konfirmasi dalam bentuk wawancara atau kuesioner untuk mengetahui kendala-kendala dalam pencapaian kinerja yang baik.

Dengan mempertimbangkan hasil analisis, kesimpulan, dan keterbatasan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: (1). Pemerintah daerah kota Semarang nampaknya perlu memperhatikan alokasi belanja daerah yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan tetap mempertimbangkan dampak positifnya terhadap PAD dan pendapatan daerah. (2). Dengan melihat adanya fenomena yang berbeda dari pengaruh belanja modal secara langsung yang bertanda positif, maka saran bagi peningkatan PAD harus menjadi perhatian besar bagi pemerintah daerah. (3). Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk :

- a. Menambahkan indikator untuk mengukur kinerja keuangan daerah.
- b. Menggunakan data laporan keuangan daerah paling tidak lima tahun terakhir.
- c. Memperluas objek penelitian.

REFERENSI

- Adi, Priyo Hari. 2007. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. Proceeding SNA IX. Padang
- Ardhani, Pungki. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Skripsi Universitas Diponegoro
- Azhar, MHD Karya Satya. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah*. Tesis. Medan
- BPS Propinsi Jawa Tengah. 2012. *Statistik Keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah 2008-2010*.
- Ekawarna, Shita Unjaswati., Sam, Iskandar., Rahayu, Sri. 2009. *Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi*. Jurnal Cakrawala Akuntansi. Jambi
- Eriadi. 2004. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah (Suatu tinjauan Terhadap Perubahan Regulasi Keuangan Daerah)*. Tesis, Medan
- Florida, Asha. 2007. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Dan Kota di Propinsi Sumatera Utara*. Tesis, Medan
- Ghozali, I. 2008. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan PLS*. Badan Penerbit Undip. Semarang
- Halim, Abdul. 2005. *Kajian Tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang*. Tesis. Malang
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Daerah & Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan peluang)*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Sularso, Havid., Restianto, Yanuar E. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Media Riset Ekonomi. Purwokerto.